

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Siregar (2015) pemerintah daerah menggunakan data dan kondisi daerah untuk membentuk asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD. Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam penyusunan APBD salah satunya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2013).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.. Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu harga berlaku



dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun-n (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n -1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2023).

Menurut Machmud (2016) Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini, disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan



pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Para ahli ekonomi sudah sejak lama berusaha untuk memahami konsep pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat di suatu negara ini. Dari pemikiran mereka, dihasilkanlah aneka teori pertumbuhan ekonomi yang bisa kita pelajari. Teori pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni teori klasik, teori neoklasik, teori neokeynes, teori W.W. Rostow, dan teori Karl Bucher.

### 2.1.1.1 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

#### 1. Teori Klasik

Menurut Sukirno (2013:433) Dalam teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik ini sudah dikembangkan sejak abad ke-17. Adam Smith adalah tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-teori ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealkth of Nation* (1776), Adam Smith menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Perhitungan output total, yaitu :

- Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Semakin banyak jumlah penduduk dalam suatu negara akan membuat tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar. Bersamaan dengan itu, output total yang melindungi barang dan jasa dipengaruhi juga oleh tiga faktor penting yaitu sumber daya alam, jumlah persediaan barang, dan



juga tenaga kerja.

- Tingkat Pertumbuhan Output Total

Untuk menghasilkan pertumbuhan output, dengan jumlah tenaga kerja yang besar maka pengelolaan sumber daya pun akan semakin menjadi lebih besar. Adam Smith menyatakan jika pengelolaan sumber daya alam dapat dimaksimalkan maka akan menghasilkan pertumbuhan output yang juga maksimal. Selanjutnya karena pertumbuhan output yang dimanfaatkan secara maksimum, maka hal tersebut memiliki sebuah pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

### 1. Teori Neokeynes

Paham Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan nasional ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa:  $Y = C + I + G + X - M$ . Persamaan ini dikenal sebagai persamaan identitas pendapatan nasional, dimana Y adalah pendapatan nasional sekaligus sebagai penawaran agregat, G menyatakan pengeluaran pemerintah, I menyatakan investasi, X - M adalah net ekspor. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar



kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional.

#### 2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2013:429) "Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan sebagainya".

##### a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan serta kandungan mineral. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah akan mempermudah usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Suatu negara yang kekurangan sumber daya alam tidak dapat membangun dengan cepat.

##### b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian SDM meliputi kualitas dan kuantitas dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

##### c. Modal

Modal merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat

diproduksi kembali. Pembentukan modal atau akumulasi merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang bertujuan untuk menaikkan stok modal, Output nasional dan pendapatan nasional. Sehingga pembentukan modal menjadi salah satu kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal dapat meningkatkan output nasional dengan bermacam-macam cara. Investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi saja, tetapi juga akan membawa ke arah kemajuan teknologi.

#### d. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menjadi faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemajuan teknologi akan mendorong munculnya penemuan-penemuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja, modal dan faktor produksi yang lain.

### 2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan yang ditempuh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian (Berto Usman & Ridwan Nurazi, 2021:75)

Pengeluaran pemerintah daerah tercermin dari belanja daerah yang terdapat dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menurut Bastian (2006), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun takwim dan berorientasi



pada tujuan kesejahteraan publik”. Sementara menurut Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil (kinerja) atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. APBD berdasarkan pendekatan kinerja terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 16 PP No. 58 tahun 2005 Pasal 20).



Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Anggaran pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Belanja adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Anggaran Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja, anggaran belanja dikelompokkan berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010:42), belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarnya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya, yang umumnya diperlukan secara periodik.

Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:





- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Belanja pegawai | 4. Belanja hibah          |
| 2. Belanja bunga   | 5. Belanja bantuan sosial |
| 3. Belanja subsidi | 6. Belanja bagi hasil     |

Soleh dan Rochmansjah (2010:46) menyatakan bahwa belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Barang dan Jasa
2. Belanja Pegawai
3. Belanja modal.

#### **2.1.2.1 Teori Dasar Pengeluaran Pemerintah**

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu teori makro dan mikro. Dalam teori ekonomi makro, ada dua pandangan yang berbeda berkenaan dengan pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional (Hidayat : 2010). Kedua pandangan yang berbeda mengenai pengeluaran pemerintah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) dalam kajian teori ekonomi makro dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Teori Musgrave dan Rostow**

Rostow (1961) dan Musgrave (1969) berpendapat bahwa perkembangan pengeluaran suatu negara berbanding lurus dengan tahap perkembangan ekonomi negara tersebut. Gagasan yang dikemukakan



oleh Rostow (1961) dan Musgrave (1969) kemudian dikenal luas sebagai teori pengeluaran negara. Terdapat perbedaan mengenai fokus alokasi sumber daya antar negara pada tahap awal perkembangan, tahap menengah pembangunan, dan tahap lanjutan yang kemudian tercermin dalam pengeluaran negara. Perbedaan dalam hal tahapan perkembangan ini tentunya berawal dari kebutuhan dan karakteristik yang berbeda pada masing-masing negara, sehingga turut berimplikasi pada arah kebijakannya yang juga berbeda. Kondisi ini tentunya berhubungan dengan seberapa lama negara itu telah merdeka, berdaulat secara Independen, dan seberapa baik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dalamnya.

## **2. Teori Wagner**

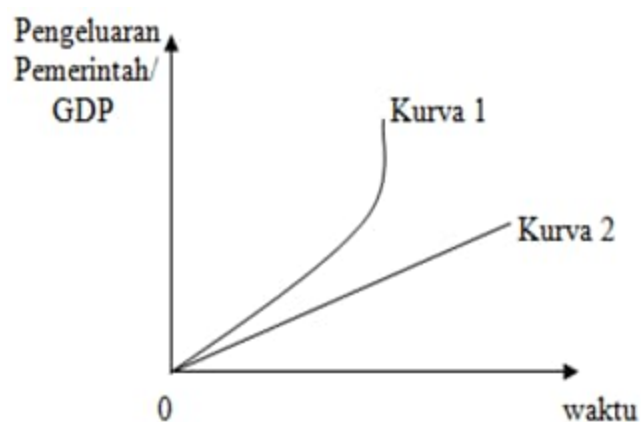
Wagner (1892) mengemukakan suatu teori yang berhubungan dengan pola perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar, terutama dalam persentasenya terhadap Gross National Product (GNP) yang juga didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang. Dari hasil pengamatan yang dilakukannya terhadap banyak Negara pada abad 19, Wagner menyimpulkan dan mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum. Namun dalam pandangannya tersebut tidak secara spesifik dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP. Apakah yang dimaksudkan oleh Wagner adalah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif, atautkah secara absolut. Jika yang dimaksudkan Wagner (1892) adalah



perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner dapat dituliskan sebagai berikut:

*"Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif, maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat."*

Hukum Wagner (1892) juga memiliki kelemahan, yang mana hukum tersebut tidak didasarkan pada teort mengenal pemilihan barang-barang publik. Pandangan yang menjadi dasar pada pengembangan teori yang digunakan (Berto Usman & Ridwan Nurazi, 2021:78) .



Gambar 2.1

### Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner

Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah



semakin meningkat. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

#### **2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dilingkungan pemerintahan yang nilai kegunaannya kurang dari satu tahun dalam periode akuntansi dan/atau pemakaian jasa dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintah suatu wilayah. Ketika belanja barang dan jasa dipenuhi dengan semestinya maka pegawai pemerintahan akan dapat memaksimalkan pelayanan publik (Pangestu, 2018).

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Belanja Barang dan Jasa yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah berupa belanja pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,



pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Menurut peraturan Kementerian Keuangan nomor 110/ PMK 02 tahun 2018, tentang klasifikasi anggaran, belanja barang dan jasa adalah untuk menampung pembelian barang dan/jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/jasa yang dipasarkan maupun yang tidak di pasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja barang zdan jasa digunakan untuk belanja barang operasional, Belanja barang non operasional, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), dan Belanja barang untuk masyarakat atau kelompok lain.

Belanja barang dan jasa bertujuan untuk pembiayaan yang langsung habis baik kegiatan yang di perjual nelikan ataupun tidak, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan untuk dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Pengadaan barang/jasa untuk investasi ialah pengadaan untuk belanja modal dalam meningkatkan asset dan/atau penambahan kapasitas. Kebijakan pengadaan barang/jasa mempertimbangkan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadapan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



### 2.1.2.3 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurut konsep Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pembayaran honorarium bagi pegawai honorer/pegawai tidak tetap dianggap merupakan bagian dari kegiatan. Dengan konsep tersebut pegawai honorer/pegawai tidak tetap adalah bagian dari kegiatan, sehingga termasuk dalam kelompok langsung.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja pegawai merupakan bagian dari belanja operasi, yaitu belanja yang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah dikeluarkan dari kas umum negara dengan manfaat yang berlangsung dalam waktu singkat atau jangka pendek. Belanja Pegawai yang memiliki kode 51, digunakan untuk membayarkan imbalan atas pekerjaan pegawai pemerintah yang telah mendukung tugas dan fungsi dari unit organisasi pemerintah baik yang berbasis di dalam negeri maupun luar negeri

(Sahuri & Sulaeman, 2021)

Belanja pegawai, merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002:55)

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang



diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

#### **2.1.4.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.





#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

#### c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang



dipisahkan antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah. Siregar dan Siregar (2001: 396) menyatakan bahwa undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah. Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan.

#### d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah yang tidak termasuk kategori pajak, retribusi, dan perusahaan daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

### **2.1.5. Teori Hubungan Antar Variabel**

#### **2.1.5.1 Hubungan Belanja Barang/Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Badrudin (2012) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Hasil penelitian Hutabarat (2013)



membuktikan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.5.2 Hubungan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Badrudin (2011), Penerimaan gaji dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.5.3 Hubungan Pendapatan asli daerah memoderasi Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan ekonomi**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Panji dan Dwirandra (2014)



diperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja daerah, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja daerah, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Liliana et all. (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Jaeni dan Anggana (2016) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja daerah memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat. Selain itu, Ogujiuba dan Abraham (2012) yang melakukan penelitian di Nigeria juga memperoleh hasil bahwa pendapatan dan pengeluaran sangat berkorelasi.

## 2.2 Penelitian sebelumnya

Jaeni, Greg. Anggana L (2016) melakukan penelitian tentang menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Teknik analisis menggunakan regresi model quasi moderating dengan basis interaksi. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Namun Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja



Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terbukti memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan model tersebut mampu menjelaskan variance Belanja Modal sebesar 85,2 %.

I G A Gede Wertianti, A.A.N.B. Dwirandra (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal dengan menggunakan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini mencakup 9 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang mana data dalam penelitian ini

berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui observasi non perilaku berupa studi dokumentasi. data penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model dengan Adjusted  $R^2$  sebesar 54,5% yang diolah dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan variabel interaksi (Moderated Regression Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa PAD mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak mampu meningkatkan pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Eka Sridawati Purba, Elsa Lorreinne Pradipta, Ruth Trifosa Taruli Manullang, Benny Rojeston Marnaek Nainggolan (2020) melakukan



penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengalokasian Belanja Modal (BM) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel moderasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan uji regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal, tetapi Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memoderasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengalokasian Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian Belanja Modal. Helly Aroza Siregar (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia, serta untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Belanja Modal dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan



DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan data sekunder tahun 2007 sampai dengan 2015 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Pekanbaru untuk mengumpulkan data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal. Sedangkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. Teknis analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan Multiple Regression Analysis (MRA) untuk melihat efek moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM, sementara Belanja Modal tidak dapat dijadikan variabel pemoderasi karena adanya Belanja Modal tidak dapat memperkuat hubungan antara Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan DAU dan Pertumbuhan DAK terhadap IPM. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan APBD Kota Pekanbaru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjadi faktor yang tidak dominan dalam meningkatkan kualitas manusia di kota ini

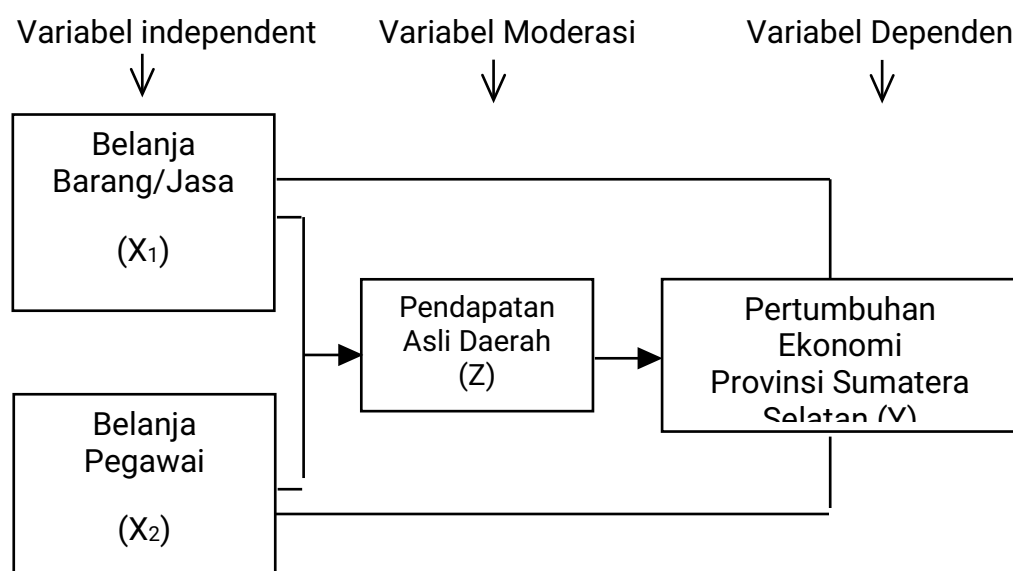
Kuncahyo Widyatama (2015) menganalisis secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013. Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data



penelitian ini berupa data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD dan tabel PDRB provinsi Jawa Tengah tahun 2011- 2013. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat uji SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, DAK, interaksi DAU dan PE, serta interaksi DAK dan PE mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU, PE, serta interaksi PAD dan PE tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan teori-teori diatas yang mengatakan bahwa Belanja Barang/Jasa dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderasi di Provinsi Sumatera Selatan. Bahwa secara sederhana kerangka pemikiran dapat dirumuskan sebagai berikut.





**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Diduga Belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>2</sub> : Diduga Belanja pegawai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

H<sub>3</sub> : Diduga Pendapatan Asli Daerah memoderasi Belanja Barang/Jasa terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

H<sub>4</sub> : Diduga Pendapatan Asli Daerah memoderasi Belanja pegawai terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.



